

KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS DI KOTA SURAKARTA

Nindy Ajeng Maharani

Email: ajengnindymaharani@gmail.com

Dr. Laila Kholid Alfirdaus S.IP., M.PP

Email: alfirdaus_laila@yahoo.com

Drs. Turtiantoro, M.Si

Email: turtiantoro@yahoo.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos: 1296

Website: <http://fisip.undip.com/> - Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan gambaran Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting bagi masing-masing daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk mengembangkan potensi wisata di daerah supaya dapat menarik minat wisatawan. Selain itu, melalui pariwisata memunculkan adanya pemberdayaan masyarakat lokal sehingga dari hal itu akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data adalah wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan observasi. Teknik wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait dengan Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta. Teknik analisis data penelitian bersifat deskriptif.

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta ada berdasarkan potensi pariwisata di Kota Surakarta dan kondisi umum di Kota Surakarta, seperti kondisi geografis dan kependudukan, selain itu sebagai wadah memberdayakan masyarakat lokal, mengingat bahwa potensi wisata di Kota Surakarta hampir seluruhnya membutuhkan bantuan masyarakat lokal. Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta dinilai mampu untuk membantu kelompok pariwisata Kota Surakarta. Namun, masih terdapat kepentingan pribadi dalam pelaksanaan Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta, yang kemudian menjadi penghambat dalam implementasinya.

Kata Kunci: Kebijakan, Pariwisata, Masyarakat

Community Based Tourism Policy in City of Surakarta

Nindy Ajeng Maharani

Email: ajengnindymaharani@gmail.com

Dr. Laila Kholid Alfirdaus S.IP., M.PP

Email: alfirdaus_laila@yahoo.com

Drs. Turtiantoro, M.Si

Email: turtiantoro@yahoo.com

Departement of Politics and Government

Faculty of Social dan Politics Sciences, Diponegoro University

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Postal Code: 1296

Website: <http://fisip.undip.com> - Email: http://fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research is a qualitative research that aims to explain the description of Community-Based Tourism Policy in Surakarta City. Tourism is one of the important sectors for each region, the Regional Government seeks to develop tourism potential in the region so that it can attract tourists. In addition, through tourism, there is an empowerment of local communities so that from this it will be able to improve the welfare of the local community.

This research uses descriptive qualitative method with data collection methods are interviews, literature study, documentation and observation. Interview technique was conducted with parties related to Community-Based Tourism Policy in Surakarta City.

The research data analysis technique is descriptive. The results of this study found that the Community-Based Tourism Policy in Surakarta City was motivated by regional limitations and to empower local communities, considering that the tourism potential in Surakarta City almost entirely requires local community assistance. The Community-Based Tourism Policy in the City of Surakarta is considered capable of helping tourism groups in the City of Surakarta. However, there is still a personal interest in the implementation of the Community-Based Tourism Policy in Surakarta City, which then becomes an obstacle in its implementation.

Keywords: Policy, Tourism, Local Community

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini berkaitan mengenai otonomi daerah, dimana daerah diberi wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri, baik sector pendidikan, kesehatan, transportasi, pariwisata, dan lain.lain. Wewenang yang diberikan karena pemerintah daerah dinilai lebih mengerti mengenai daerahnya sendiri maka diharapkan otonomi daerah yang diberikan dapat memajukan masing-masing daerah.

Seperti yang sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, salah satu wewenang daerah adalah terkait potensi pariwisata yang dimiliki. Pemerintah daerah diberikan wewenang guna mengatur mengenai pengembangan dan potensi pariwisata local yang ada. Pariwisata merupakan salah satu sector yang dinilai penting bagi suatu daerah, maka pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap pariwisata local. Menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Kepariwisataaan, menyatakan bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Menurut Nyoman S. Pendit (2006), jenis-jenis pariwisata yang terbagi menjadi pariwisata budaya, kesehatan, olah raga, komersial, industri, politik, konvensi, sosial, pertanian, maritim (bahari), cagar alam, buru, pilgrim.

1. Pariwisata Budaya

Wisata yang dilakukan untuk mengetahui keadaan masyarakat di suatu daerah, mengetahui kebiasaan atau adat istiadat, cara hidup, serta mempelajari budaya dan keseniannya.

2. Pariwisata Kesehatan

Wisata kesehatan dapat diartikan sebagai perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari demi kepentingan beristirahat dalam arti jasmani dan rohani.

3. Pariwisata Olahraga

Perjalanan wisata yang berkaitan dengan olahraga, misal menyaksikan pertandingan besar seperti Thomas Cup, Uber Cup, Sea Games, Asean Games.

4. Pariwisata Komersial

Wisata yang dilakukan untuk kegiatan komersil seperti pameran, expo, dan pekan raya.

5. Pariwisata Industri

Suatu kegiatan wisata yang dilakukan rombongan pelajar/ mahasiswa ke daerah perindustrian untuk kegiatan penelitian.

6. Pariwisata Politik

Perjalanan wisata yang dilakukan untuk mengambil kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan politik.

7. Pariwisata Sosial

Wisata sosial bisa dijelaskan sebagai pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan. Misalnya, bagi kaum buruh, petani atau anak- panti asuhan.

8. Pariwisata Pertanian

Wisata yang dilakukan dengan hal yang berkaitan dengan kegiatan pertanian, misal pembibitan, panen, dan sebagainya.

9. Pariwisata Maritim/ Bahari

Wisata yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan air.

10. Pariwisata Cagar Alam

Perjalanan wisata mengunjungi tempat-tempat yang berkaitan dengan alam, hutan lindung, suaka margasatwa dan sebagainya yang dilindungi oleh undang-undang.

11. Pariwisata Buru

Merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.

12. Pariwisata Pilgrim

Pariwisata pilgrim berkaitan dengan wisata religi yang bertujuan pada hal keagamaan dan keTuhanan. Dapat diartikan sebagai bentuk ziarah ke makam tokoh-tokoh agama misal Makam Walisongo, Makam Habib, Pura.

Potensi wisata yang dimiliki daerah jika dilihat dari jenis-jenis pariwisata yang ada berbeda-beda, maka melalui otonomi daerah dilakukan pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata local yang ada. Salah bentuk wewenang daerah dalam mengembangkan pariwisata local adalah inovasi pariwisata berbasis komunitas atau masyarakat, dimana dalam inovasi ini masyarakat dilibatkan dalam upaya pengembangan pariwisata local. Masyarakat dianggap mampu dalam mengembangkan pariwisata di daerahnya, bahkan pariwisata yang menggunakan peran masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan pariwisata yang berbasis komunitas dinilai mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pariwisata dengan menggunakan peran masyarakat disisi lain juga sebagai bentuk pemberdayaan bagi masyarakat setempat serta sebagai bentuk usaha pelestarian sumber daya yang ada di daerah tersebut. Kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas, apalagi jika suatu daerah memang fokus pengembangannya adalah masyarakat sebagai daya tariknya. Menurut Johnson 2010 dalam Syah (2019) dalam jurnal yang berjudul "Anlysis of Community Based Taorism in Yungulila Community, Pichinca Province, Ecuador"

yang dibuat oleh Jose Lazaro Quintaro Santos, menjabarkan bahwa Community Based Tourism (CBT) merupakan suatu proses dimana pariwisata digunakan sebagai alat dalam pengembangan masyarakat, partisipasi masyarakat setempat diperlukan dalam membangun kapasitas masyarakat untuk mengelola pariwisata. Dengan cara ini, pengembang swasta atau pemerintah dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata (Syah, 2019). Pengembangan pariwisata dengan menggunakan peran masyarakat saat ini sedang gencar dilakukan oleh berbagai daerah yang ingin mengembangkan pariwisata yang dimilikinya. Sesuai pengertian dari pariwisata berbasis komunitas bahwa masyarakat sebagai focus utama dalam pengembangan pariwisata setempat. Focus utama disini adalah yang pertama focus dalam pemberdayaan masyarakat sekitar karena masyarakat diajari tentang bagaimana cara mengelola pariwisata daerahnya dengan baik lalu focus yang kedua adalah masyarakatlah yang berperan serta bertanggung jawab dalam pengembangan pariwisata. Dari sini dapat diketahui bahwa komunitas/ masyarakat dinilai penting karena keberhasilan pengembangan pariwisata

daerah setempat sangat bergantung kepada masyarakat.

Surakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kota Solo merupakan salah satu kota kecil yang memiliki keanekaragaman sumber dayanya terutama adalah budaya. Surakarta terkenal dengan kekayaan budayanya, melalui budayanya inilah Solo dikenal oleh masyarakat luas. Budaya Kota Surakarta lah yang menjadi daya tarik wisata local karena budaya solo memiliki potensi pariwisata yang tinggi untuk dikembangkan. Pemerintah Kota Surakarta selalu berinovasi untuk pengembangan pariwisata daerahnya, salah satunya adalah pengembangan pariwisata dengan menggunakan peran komunitas. Selain itu jenis-jenis pariwisata yang ada di Kota Surakarta juga hampir seluruhnya dijalankan oleh masyarakat Kota Surakarta, jenis pariwisata yang terdapat di Kota Surakarta yaitu:

1. Pariwisata Budaya

Pariwisata di Kota Surakarta termasuk dalam jenis pariwisata budaya, hal ini dikarenakan jika wisatawan berwisata ke Kota Surakarta akan mempelajari sejarah yang ada di Kota Surakarta. Objek wisata kota dapat ditemukan pada bangunan-bangunan bersejarah di Kota Surakarta, seperti Keraton Kasunanan, Keraton

Mangkungaran, Benteng Vestenburg, Pasar Triwindu, Loji Gandrung, Pasar Klewer. Kota Surakarta terkenal dengan sebutan kota budaya, terdapat banyak budaya yang menjadi ikon Kota Surakarta yang kemudian menjadi objek wisata Kota Surakarta. Wisata budaya di Kota Surakarta dapat di temukan pada setiap event-event yang terdapat di Kota Surakarta, seperti Solo Batik Carnival (SBC), Solo Menari 24 Jam, Solo Batik Fashion, Kreasi Anak Sekolah Solo (Kreasso), Solo International Performing Art (SIPA), Festival Jenang, Festival Payung, Grebeg Maulud, Sekaten, Sendratari Ramayana di Taman Balakambang, Wayang Orang Sriwedari, Museum Keris, Kampung Wisata Batik Kauman dan Laweyan.

2. Pariwisata Kuliner

Selain dikenal sebagai kota budaya, Surakarta juga dijuluki sebagai kota kuliner, dimana kuliner di Kota Surakarta memiliki banyak sajian-sajian yang menggugah selera, seperti Selat Solo, Serabi Solo, Timlo Solo, Wedangan Khas Solo (Angkringan), Tengkleng, Nasi Liwet, Gudeg Ceker, dan lain-lain, bahkan orang hanya berkunjung ke Surakarta hanya untuk menikmati kuliner Kota Surakarta. Kuliner di Kota Surakarta sudah menjadi wisata, pemerintah

menyediakan Galabo (Gladak Langen Bogan) dan Kuliner Kota Barat yang menjadi sentra kuliner kuliner Kota Surakarta. Selain sentra wisata kuliner yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta, tempat-tempat kuliner lain yang sering dikunjungi wisatawan luar Surakarta adalah, Timlo Sastro, Soto Gading, Selat Mbak Lies, Gudeg Ceker Bu Kasno, Serabi Notosuman, Tengkleng Klewer Bu Edi, Susu Segar Shijack, dan Wedangan-wedangan yang terdapat di Kota Surakarta. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kuliner di Kota Surakarta seperti magnet yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Surakarta.

3. Pariwisata Religi

Kota Surakarta selain terkenal sebagai kota budaya juga terkenal dengan kota religi yang kemudian dijadikan sebagai wisata religi. Wisata religi yang terdapat di Kota Surakarta yaitu pada Haul Habib yang terletak di area Kecamatan Pasar Kliwon tepatnya di Masjid Riyadh. Acara ini merupakan acara tahunan yang sudah menjadi budaya Kota Surakarta yang menarik minat kunjungan wisatawan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Haul Habib atau biasa yang disebut masyarakat Surakarta dengan sebutan Kol-kolan

merupakan sebuah tradisi ziarah ke makam Habib-habib yang terletak di dalam Masjid Riyadh, selain itu juga terdapat acara pengajian. Selain Haul Habib, wisata religi di Kota Surakarta juga ditawarkan di Area Kampung Wisata Batik Kauman, dimana di area Kampung Kauman merupakan pusat sejarah penyebaran Agama Islam di Kota Surakarta. Wisata religi yang ditawarkan di Kampung Batik Kauman bekerja sama dengan Keraton Kasunanan Surakarta, yang menjadi daya tarik wisata ini adalah pada kegiatan di Bulan Ramadhan.

4. Pariwisata Belanja

Sebuah tempat wisata tak terlepas dari yang namanya oleh-oleh. Di Surakarta, yang menjadi destinasi wisatawan untuk berbelanja oleh-oleh terletak di Pusat Grosir Solo (PGS), Beteng Trade Center (BTC) dan Pasar Klewer. Tiga tempat ini merupakan pusat belanja wisatawan yang berkunjung yang tentu saja juga menjadi destinasi wisata para wisatawan.

5. Pariwisata Edukasi

Pariwisata edukasi di Kota Surakarta terletak di Kampung Wisata Batik dan Kauman, dimana di tempat ini terdapat paket wisata untuk belajar membatik bagi

wisatawan yang berkunjung ke Kota Surakarta.

6. Pariwisata Cagar Alam

Salah satu wisata cagar alam di Kota Surakarta yang menjadi ciri khas Kota Surakarta adalah Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) yang merupakan kebun binatang satu-satunya di Kota Surakarta. Di Taman Jurug, terdapat macam-macam hewan dan rekreasi hiburan seperti memancing, memberi makan hewan-hewan, bermain dengan gajah dan unta, dan banyak hal lain yang menjadi pilihan para wisatawan untuk datang ke Jurug.

7. Pariwisata Olahraga

Di Surakarta terdapat Stadion Manahan, yang menjadi ikon Kota Surakarta, di Stadion Manahan sering menjadi tempat pertandingan laga-laga besar yang kemudian menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Surakarta menyaksikan pertandingan olahraga tersebut.

Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta juga berupaya untuk meningkatkan mobilitas pariwisata di Kota Surakarta, Pemkot menyediakan Batik Solo Trans (BST) untuk mempermudah wisatawan berkeliling Solo, dan juga Pemkot menyediakan Sepur Klutuhuk Jaladara dan

Bus Werkudara dimana kedua transportasi tersebut disediakan untuk menunjang kebutuhan pariwisata, dan juga dijadikan sebagai objek wisata di Kota Surakarta.

Potensi Pariwisata Solo (Surakarta) dapat berasal dari sudut mana di kota kecil ini, kehidupan malam Kota Surakarta faktanya menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan untuk tetap berkunjung ke Kota Surakarta. Wisata Kuliner malam, HIK (Hidangan Istimewa Kampung)/ Wedangan, menjadi kunci dalam wisata malam Solo. Di Surakarta, wedangan sangat mudah ditemui di berbagai sudut kota ini, Pemkot Surakarta sendiri mengizinkan wedangan untuk buka sampe larut malam, dan faktanya, menjelang pagi pun masih terdapat orang yang berkunjung, baik dari dalam kota maupun pengunjung luar kota. Masyarakat Surakarta sendiri tidak menolak jika Surakarta mendapat sebutan sebagai sebagai "Kota Yang Tidak Pernah Tidur", karena memang seperti itu dan sudah ciri khas Kota Surakarta.

Pemerintah Surakarta menilai bahwa masyarakat sangat berperan penting dalam pengembangan pariwisata Surakarta, terlebih terhadap beberapa potensi wisata di Kota Surakarta. Adanya perhatian khusus kepada masyarakat seperti yang sudah

dijelaskan dalam Perda tentang Kepariwisata menandakan bahwa pariwisata di Surakarta memang dibangun dengan basis masyarakat sebagai focus utamanya, disisi lain maksud dari pengembangan pariwisata berbasis komunitas adalah sebagai wujud pemberdayaan masyarakat serta usaha dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan mengenai pengembangan pariwisata dengan menggunakan peran komunitas diatur sedemikian rupa sesuai dengan keadaan Kota Surakarta, khususnya terhadap potensi wisata yang menekankan peran masyarakat. Contoh wisata yang terkenal di Kota Surakarta adalah wisata Kampung Batik yang terdapat di Kauman dan Laweyan, konsep wisata kampung batik sendiri adalah dimana wisatawan disuguhkan bagaimana proses pembuatan batik oleh masyarakat setempat dimana seluruh masyarakat di kampung tersebut adalah para pengrajin batik. Hal ini juga dapat disebut sebagai bentuk usaha pengembangan UMKM. Selain wisata kampung batik, Kota Surakarta juga memiliki Wisata Pasar Triwindu yaitu pasar yang menjual barang-barang antic, disini terdapat komunitas para pedagang barang antic.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan mengenai kondisi pariwisata di Kota Surakarta kemudian mengungkap potensi dan peluang diberlakukannya kebijakan pariwisata berbasis komunitas di Kota Surakarta dan bagaimana implemetasi kebijakan pariwisata berbasis Komunitas di Kota Surakarta yang di jabarkan melalui manfaat dan hambatan kebijakan tersebut.

C. Tinjauan Teori

1. Pariwisata Sebagai Sektor Kebijakan Publik

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting bagi sebuah daerah, dalam mengelola sebuah pariwisata tidak hanya dilakukan secara mengambang saja melainkan dilakukan secara serius. Pemerintah daerah mengupayakan bagaimana supaya pariwisata di daerah dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Inovasi-inovasi dalam pengelolaan pariwisata tak luput dari semua itu. Pemerintah juga mengatur dan mengelola pariwisata melalui kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengembangan pariwisata daerahnya.

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parsons, 1997). Pemerintah dalam menyusun sebuah kebijakan publik tidak hanya membutuhkan waktu yang sebentar saja, melainkan membutuhkan waktu dan proses yang sesuai dengan siklus yang telah disebutkan. Kebijakan publik tidak hanya menyangkut kepentingan pemerintah saja, melainkan menyangkut dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Ketika kebijakn tersebut dirasa perlu maka akan ditindak lanjuti. Kebijakan berangkat dari masalah-masalah yang ada ditengah masyarakat, yang kemudian diseleksi sesuai dengan urgensi penyelesaian masalah. Edwards (dalam Ponto, 2016). Mengatakan bahwa kebijakan Negara yaitu “is what government say and do, or not do, it is the goals or purposes of government programs” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah). Berdasarkan dari pengertian tersebut bahwa kebijakan publik disusun oleh pemerintah dan menyangkut kepentingan orang banyak. Serangkaian proses penyusunan kebijakan publik

dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu biasanya adalah pemerintah (negara) dan mengarah pada kepentingan masyarakat.

b. Pariwisata Berbasis Komunitas

Perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini sudah tidak dapat disepelekan lagi. Potensi-potensi wisata yang dari seluruh wilayah Indonesia mulai dikelola dengan baik. Hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki keindahan dan keunikan yang dapat dijadikan sebagai tujuan wisatawan. Hal ini lah yang kemudian mendorong pemerintah untuk aktif dalam pengelolaan pariwisata yang ada. Mulai dari yang tertulis hingga yang terjun langsung ke lapangan. Dalam hal tertulis adalah perumusan kebijakan yang menyangkut tentang pengelolaan pariwisata. Salah satu kebijakan dalam pengelolaan pariwisata yaitu kebijakan pariwisata yang menggunakan basis komunitas. Komunitas disini diibaratkan adalah masyarakat. Pengelolaan pariwisata di Indonesia saat ini sudah banyak menggunakan peran komunitas dalam pengembangannya. Sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa komunitas adalah salah satu bentuk dalam upaya pengembangan pariwisata di Indonesia. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan,

yang menyatakan bahwa destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata tidak lepas dari yang namanya masyarakat, pengembangan suatu destinasi wisata lokal memerlukan masyarakat. Suansri (2003:14) mendefinisikan pariwisata berbasis komunitas sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, dan budaya. Pariwisata berbasis komunitas merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan. Atau dengan kata lain pariwisata berbasis komunitas merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Tosun dan Timothy (2003) menyebutkan bahwa aspek penting dalam pariwisata berkelanjutan adalah penekanan kepada pariwisata berbasis masyarakat. Pariwisata berbasis komunitas dirasa perlu dalam pengembangan pariwisata Indonesia, hal ini dikarenakan masyarakat dinilai lebih mengerti dan mengenal potensi pariwisata di daerahnya, disisi lain hal ini sebagai bentuk dari pemberdayaan masyarakat lokal.

Masyarakat lokal merupakan bagian tidak terpisahkan dari destinasi pariwisata. Integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata dimaksudkan untuk memastikan masyarakat lokal mendapat ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata.

c. Kelebihan dan Kelemahan Pariwisata Berbasis Komunitas

Segala aspek yang ada di kehidupan memiliki kelebihan dan kelemahan, tidak terkecuali sebuah pembentukan inovasi kebijakan. Pariwisata berbasis komunitas merupakan bentuk dari sebuah inovasi kebijakan maka didalamnya terdapat kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaannya. Kelebihan dan kelemahan bukanlah suatu hal baru, dalam beberapa inovasi kebijakan juga terdapat hal tersebut. Kelebihan dapat dikatakan sebagai unggulan dari suatu hal atau keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kelemahan dapat dikatakan sebagai hambatan dari suatu hal. Dalam penerapan atau pelaksanaan pariwisata berbasis komunitas kelebihan yang ada antara lain:

1. Peningkatan pendapatan masyarakat

Pariwisata berbasis komunitas menekankan pada peran serta masyarakat setempat, sehingga pengelolaan dan pengembangan pariwisata sebagian besar dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Misal saja, dalam sebuah tempat wisata pasti terdapat pusat jajanan, pusat cinderamata, penginapan, dan sebagainya. Dimana semua itu dilakukan oleh masyarakat lokal, sehingga masyarakat memperoleh pemasukan dari semua itu.

2. Adanya Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Menurut Sulistiyani dalam Andriyani,2017, pemberdayaan adalah sebagai proses yang menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Masyarakat adalah objek utama dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas, sehingga masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam pengembangan pariwisata lokal. Disinilah terdapat pemberdayaan masyarakat lokal terutama berkaitan dengan potensi destinasi wisata. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan biasanya seperti pelatihan-pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana menghadapi

wisatawan, pelatihan dalam mengolah sumber daya sekitar seperti pembuatan kerajinan-kerajinan sebagai cinderamata, dan bentuk-bentuk pemberdayaan lainnya yang tentu saja bertujuan dalam pengembangan pariwisata lokal.

Menurut Tosun dalam I Made Kampana hambatan dalam pelaksanaan pariwisata berbasis komunitas diantaranya:

1. Keterbatasan Operasional, misalnya dalam hal sentralisasi administrasi publik, lemahnya koordinasi, dan minimnya penyebaran informasi wisata.
2. Keterbatasan Struktural, berkaitan dengan minimnya sumber daya manusia yang ada, perilaku pariwisata, dominasi elite masyarakat, minimnya akses modal financial.
3. Keterbatasan Kultural, berkaitan dengan terbatasnya kapasitas terutama pada masyarakat miskin dan apatis atau masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran pada pariwisata lokal yang rendah.

Hambatan atau kelemahan dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas tidak selamanya akan menjadi tantangan, hal ini dapat diatasi apabila masyarakat dan pemerintah bekerja sama secara maksimal supaya terwujud keberhasilan dalam pariwisata lokal.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian deskriptif kualitatif dikenal sebagai metode penelitian yang seringkali diaplikasikan untuk menjelaskan hasil analisis terkait fenomena, kejadian, atau keadaan secara sosial.

E. HASIL PENELITIAN

Seperti yang telah di jabarkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang diberikan disediakan serta difasilitasi oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa pariwisata juga tidak dapat berjalan tanpa adanya masyarakat itu sendiri, meskipun ada pemerintah dan anggaran namun jika tidak ada masyarakat itu setempat maka pariwisata tidak dapat berjalan dengan maksimal. Dari hal ini maka masyarakat sengaja digerakan guna menjalankan potensi wisata yang ada. Tak terkecuali Kota Surakarta yang turut serta mengembangkan potensi pariwisata daerahnya dengan bekerja dengan masyarakat lokal. Hal ini tidak dapat dipungkiri dan sudah menjadi rahasia umum

jika pariwisata di Kota Surakarta tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang membentuk komunitas pariwisata atau kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Surakarta, menyebutkan bahwa masing-masing kecamatan di Kota Surakarta memiliki komunitas pariwisata sendiri, dimana komunitas pariwisata tersebut memiliki fokus wisata yang berbeda-beda. Komunitas-komunitas pariwisata di Kota Surakarta tidak seutuhnya hanya dari komunitas yang berlatar belakang seni dan budaya, namun komunitas yang mendukung keberlanjutan pariwisata seperti pada sektor transportasi, akomodasi, kuliner, juga turut serta dalam upaya pengembangan pariwisata di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan hotel-hotel sebagai penyedia jasa akomodasi bagi wisatawan serta dengan Dinas Perhubungan menyangkut penyediaan jasa transportasi bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Surakarta.

Kota Surakarta menerapkan kebijakan pariwisata berbasis komunitas dalam pengembangan pariwisata daerahnya, penciptaan kebijakan ini tidak serta-merta hanya ingin menjalankan kewenangan otonomi daerah. Kebijakan dilaksanakan setelah melalui proses yang panjang dengan

kata lain pemerintah memiliki alasan sendiri yang menjadi latarbelakang dikeluarkannya kebijakan tersebut. Kondisi geografis Kota Surakarta menjadi latar belakang diberlakukannya Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas, selain itu potensi masyarakat juga menjadi alasan utama dalam kebijakan ini. Sasaran dan tujuan lain dari adanya kebijakan pariwisata berbasis komunitas sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat itu sendiri, disebutkan dalam wawancara bahwa latarbelakang dari adanya kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan SDM yang ada, jika pariwisata sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah maka tidak akan berjalan dengan baik, disini lain masyarakat nantinya akan merasa acuh terhadap pengembangan pariwisata lokal. Jika masyarakat ikut serta berperan dalam pengembangan pariwisata maka seiring berjalannya waktu masyarakat akan terlatih dalam urusan kepariwisataan, hal ini juga termasuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat kemudian juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dari wisata. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata juga disebutkan bahwa pariwisata ditujukan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan serta sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

Industri pariwisata diprediksi akan meningkat pesat ditahun-tahun selanjutnya, maka dari itu harus adanya peran serta masyarakat dalam peningkatan pariwisata Kota Surakarta, dimana potensi wisata dalam masing-masing kelurahan harus digerakkan maka dibentuklah pokdarwis guna membantu hal tersebut. Pariwisata dinilai akan berkembang pesat di kemudian hari, maka berdasarkan potensi serta peluang yang ada, Pemerintah Kota Surakarta mulai mempersiapkan masyarakat lokal untuk ikut serta dalam pengembangan pariwisata di Kota Surakarta, terlebih jenis-jenis pariwisata di Kota Surakarta hampir seluruhnya mengandalkan masyarakat.

Kebijakan pariwisata berbasis komunitas di Kota Surakarta, fakta dilapangan menunjukan keselarasan dimana melalui kebijakan ini komunitas-komunitas pariwisata atau yang tergabung dengan sebutan pokdarwis ikut serta dalam pengembangan pariwisata di Kota Surakarta, dimana masyarakat Kota Surakarta yang terintegrasi dalam komunitas-komunitas pariwisata ikut serta dalam event-event pariwisata Kota Solo, seperti yang kita tahu bahwa jenis pariwisata di Kota Surakarta adalah pariwisata budaya. Misal saja Event Solo Menari 24 Jam, komunitas pariwisata sangat berperan dalam acara tersebut,

sanggar-sanggar tari yang ada di Kota Surakarta yang termasuk dalam komunitas-komunitas tari di Kota Surakarta yang berperan besar dalam event tersebut. Lalu, pada event Festival Jenang, dimana masing-masing kelurahan lah yang berperan pada event tersebut. Dengan adanya kebijakan pariwisata berbasis komunitas di Kota Surakarta, memunculkan potensi-potensi wisata di setiap kelurahan di Kota Surakarta, lalu masing-masing kelurahan tersebut membentuk suatu pokdarwis.

Kebijakan Pariwisata berbasis komunitas di Kota Surakarta mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Surakarta, untuk itu Pemerintah Kota Surakarta berupaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas SDM pariwisata Kota Surakarta, hal ini supaya kebijakan ini dapat berjalan selaras dan dapat lebih lagi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta pemberdayaan masyarakat lokal. Sebagai wujud dari implementasi dari kebijakan pariwisata berbasis komunitas di Kota Surakarta, Pemkot memberikan anggaran kepada salah satu warga Surakarta yang berhasil mendapat penghargaan di Piala Citra pada kategori film dokumenter, dimana pemberian anggaran adalah untuk pembuatan film baru yaitu dengan judul

"Kesan Pada Liburan", diharapkan nantinya film ini dapat menjadi media promosi pariwisata Kota Surakarta.

Event-event di Kota Surakarta yang menjadi potensi pariwisata seperti SIPA, Kreasso, Festival Jenang, Solo City Jazz, Festival Payung, seutuhnya dilaksanakan oleh komunitas-komunitas terkait dan Pemerintah Kota hanya memberikan anggaran. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu sasaran dalam implementasi Kebijakan Pariwisata Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta membantu dalam masyarakat berinovasi dalam rangka menarik minat wisatawan, hal ini dilakukan supaya masyarakat dapat bersaing dengan pelaku wisata daerah lain. Selain dalam membantu berinovasi, pemerintah kota bahkan kecamatan juga membantu dalam hal branding potensi wisata setempat yang notabene dilaksanakan oleh masyarakat.

Misal saja, Keraton Kasunanan Surakarta merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Surakarta, tidak hanya potensi wisata dari segi bangunan tetapi juga event-event tahunan yang sudah ada dalam kalender keraton, dimana dari dua hal tersebut juga menjadi daya tarik wisata yang dapat mendatangkan wisatawan. Pemerintah

sebagai implementasi dalam Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Salah satu hal yang nampak dikala pandemi yaitu pelatihan promosi wisata dan produk UMKM berbasis online kepada pelaku pariwisata di Kampung Wisata Batik Kauman.

Dalam berjalannya kebijakan pariwisata berbasis komunitas di Kota Surakarta ditemukan beberapa hambatan seperti:

- Adanya Pro Kontra dari berbagai pihak

Kebijakan pariwisata berbasis komunitas, dasarnya adalah masyarakat, tidak hanya satu masyarakat namun berbagai lapisan masyarakat dengan pemikiran yang berbeda-beda. Hal ini yang kemudian menuai pro kontra dalam pelaksanaan kebijakan ini, hal lain yang ditakutkan adalah dimana akan terjadi persaingan tidak sehat antar komunitas pariwisata, hal ini yang kemudian menjadikan kebijakan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah diperlukan, Pemkot Surakarta berusaha agar komunitas pariwisata dapat bersaing secara sehat dalam pengembangan pariwisata Kota Surakarta supaya tetap tercipta suasana harmonis.

- Adanya kepentingan dari pihak tertentu

Tantangan atau hambatan lain dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah berasal dari komunitas pariwisata di Kota Surakarta, terdapat salah satu event pariwisata di Kota Surakarta yaitu SIEM yang terpaksa harus dihilangkan karena dalam komunitas pariwisata tersebut dibentuk bukan untuk kepentingan masyarakat Kota Surakarta, melainkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga Pemerintah Kota Surakarta terpaksa harus menghilangkan event ini, sangat disayangkan karena event ini dinilai unik dan dapat menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung ke Kota Surakarta.

Manfaat adanya Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta juga dirasakan oleh komunitas pariwisata yang tergabung dalam Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman. Dengan adanya kebijakan ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak punya usaha kemudian dibantu sehingga memiliki usaha, hal ini dilakukan guna meningkatkan daya tarik wisatawan mengingat daya tarik Kampung Wisata Batik Kauman adalah Usaha Batik. Disisi lain, pemerintah membantu masyarakat dalam ekspor batik. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah haruslah berkaitan dengan badan hukum, jika pemerintah ingin melakukan

kerjasama dengan komunitas pariwisata harus dengan komunitas yang sudah berbadan hukum. Hal ini menjadi suatu halangan, namun dari adanya kebijakan ini maka terdapat manfaat yang di dapatkan oleh Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman, dimana pemerintah membantu dalam pembuatan badan hukum yang nantinya jika akan bekerja sama dengan pemerintah tidak akan kesulitan lagi sehingga masyarakat dapat lebih luas dalam merasakan manfaat kebijakan ini. Pemerintah membiayai serta menjadi fasilitator dari pembentukan badan hukum ini yaitu Serikat Dagang Kauman yang mengarah pada koperasi. Wujud nyata dari manfaat Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas adalah, adanya pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan pariwisata dari Pemerintah Kota dan Dinas Terkait, pemberdayaan ini dimaksudkan supaya masyarakat lebih lagi mengetahui cara bagaimana mengelola potensi wisata yang baik sehingga dapat menarik minat wisatawan dan mendapatkan income. Bentuk dari pemberdayaan itu sendiri adalah dari pelatihan SDM, dimaksudkan supaya SDM yang ada lebih berinovasi serta peningkatan kreativitas, lalu pelatihan manajemen, terkhusus dalam manajemen keuangan. Tidak hanya manfaat dalam

pemberdayaan masyarakat saja namun masyarakat juga mendapat bantuan berupa peralatan yang menjadi kebutuhan komunitas pariwisata serta promosi pariwisata kepada masyarakat luar.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dilakukan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya disimpulkan sebagai berikut:

1. Potensi-potensi wisata di Kota Surakarta sebagian besar mengandalkan dari sisi budaya, kuliner, belanja, edukasi, dan sejarah-sejarah di Kota Surakarta. Hal ini lah yang kemudian menjadi peluang untuk di terapkannya pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Kota Surakarta.
2. Pemberdayaan masyarakat lokal serta kondisi geografis Kota Surakarta menjadi salah satu alasan diterapkannya pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Kota Surakarta.
3. Hambatan dalam implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta yaitu muncul adanya pro kontra antara berbagai pihak, gesekan antara komunitas pariwisata di Kota Surakarta karena mayoritas komunitas pariwisata di

Kota Surakarta memiliki latarbelakang potensi wisata yang sama yaitu pada bidang budaya dan seni.

4. Manfaat implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta yaitu adanya pemberian fasilitas dan pelatihan kepada masyarakat pelaku pariwisata di Kota Surakarta sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal. Adanya Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas, terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat melaluo sektor pariwisata.

5. Bentuk implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta adalah menciptakan kelompok-kelompok wisata (pokdarwis) di masing-masing kelurahan di Kota Surakarta dan menjadikan tiap-tiap kelurahan di Kota Surakarta mulai mengembangkan potensi wisata yang ada dan dijalankan oleh masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Saran

Saran untuk Dinas Pariwisata dan Pemerintah Kota Surakarta terkait Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta, diharapkan dapat meningkatkan pelatihan sebagai pemberdayaan masyarakat terlebih pelatihan manajemen guna

menghindari pro dan kontra yang terjadi di antara komunitas-komunitas pariwisata di Kota Surakarta. Selain itu, diharapkan untuk kerja sama antara pemerintah dengan pelaku wisata adalah sama rata sehingga tidak memunculkan gesekan antara komunitas, dan juga untuk penganggaran kepada komunitas pariwisata di Kota Surakarta lebih ditekankan lagi sehingga komunitas pariwisata di Kota Surakarta lebih leluasa dalam mengembangkan kreativitasnya tanpa harus terhalang dana. Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Pariwisata Kota Surakarta harus tetap mempertahankan hubungan dengan komunitas-komunitas pariwisata di Kota Surakarta supaya pariwisata di Kota Surakarta lebih lagi berkembang karena jantung pariwisata Kota Surakarta adalah masyarakat Kota Surakarta sendiri.

Saran untuk penelitian selanjutnya terkait Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas, diharapkan dapat lebih luas dalam mengeksplorasi jangkauan terhadap temuan informan mengenai kebijakan berbasis komunitas di Kota Surakarta, sehingga dapat menemukan hambatan lain dalam implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta serta permasalahan-permasalahan lain terkait komunitas pariwisata di Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, A. I., Martono, E., & Muhamad. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya* (Studi di Desa Wisata Panglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol.23 No.1.

Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

Pomto, M, A., Pioh, R. N., & Tasik, F. (2016). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial, Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan*

Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*.

Pendit, N.S (2006). *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suansri, P.(2003). *Community Based Tourism Hand Book*. Thailand: Rest Project.

Undang - Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009.